

## ABSTRACT

Mohamad Allamul Wafa (NIM 18220020), Implementation of agregating PMTB 2019 Disagregation Survey Policy in Nganjuk Distric, Supervisor I: Dr. IGG. Heru Marwanto, M.Si.

One of National Priority at 2019 is Development of Business and Tourism, Investment Climate Improvement program and employment building need physical investment or called gross fixed capital building (PMTB) that disagregated by institution and business field. For fulfill the data requirements so The governmen instruct The central Statistic Agency (BPS)to apply PMTB Survey. The central Statistic Agency (BPS)of Nganjuk District is representative of The central Statistic Agency (BPS) at district city has implemented PMTB Disagregation Survey at 2019.

PMTB 2019 Disagregation Survey is public policy that taken by BPS to provide the data that needed by the Government. The public policy must meet the requirements role of Public policy.According to George Edward III in Widodo (2010:96) there are four factor that influence the implement public policy are successful or failure that is (1) communication, (2) resource, (3) Disposition and (4) bureaucratic structure.

The results showed that the Implementation of agregating PMTB 2019 Disagregation Survey Policy in Nganjuk Distric: Communication has already well, the process of communiation has been done comply with the principles of transmission, consistency and clarity. The resource has already well, The resource covers a Budget resources, human resources (HR), equipment resources and authority resources already well, there is a little note that resource covers a Budget resources not well enough. Disposition has already well, all officers involved have a strong will to carry out their duties seriously, the the officer recruitment process has been carried out properly according to the Standart Of Procedure (SOP). The bureaucratic structure has already well, there are the guidelines of operational procedure book for survey activities including the implementation manual has completed.

Keywords: implementation, policy, communication, resources, disposition, bureaucratic structure

## ABSTRAKSI

Mohamad Allamul Wafa (NIM 18220020), Implementasi Kebijakan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 Di Kabupaten Nganjuk. Pembimbing I: Dr. IGG. Heru Marwanto, M.Si., Pembimbing II: Dr. Teguh Pramono, M.Si.

Salah satu Prioritas Nasional tahun 2019 adalah Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, program Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja maka dibutuhkan data investasi fisik atau biasa disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diuraikan (*di-disagregasi*) menurut institusi dan lapangan usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB. BPS Kabupaten Nganjuk sebagai perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah tingkat kabupaten sudah melaksanakan Survei Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 pada tahun 2019.

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 merupakan kebijakan publik yang diambil BPS untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh pemerintah. Sebagai sebuah kebijakan publik tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah dalam kebijakan publik. Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2019 di Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwasanya komunikasi sudah baik, proses komunikasi yang dilaksanakan sudah memenuhi prinsip transmisi, konsistensi dan kejelasan. Sumber daya sudah baik, sumber daya pendukung meliputi Sumber daya anggaran, Sumber daya manusia (SDM), Sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan sudah baik, dengan sedikit catatan hanya sumber daya anggaran yang belum cukup baik. Disposisi cukup baik, semua petugas yang terlibat mempunyai kemauan yang kuat untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, proses rekrutmen petugas sudah dilaksanakan dengan baik sesuai SOP. Struktur Birokrasi sudah baik, ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Survei meliputi buku pedoman petunjuk pelaksanaan sudah cukup lengkap.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi